



**KOMUNIKASI POLITIK BUPATI WING CHIN TERHADAP
KELUARGA BESAR SAREKAT ISLAM (KBSI) DI
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017-2019**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

Erina Fionita Nurfajila
NIM 3312416032

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : **Senin**

Tanggal : **30 Maret 2020**

Dosen Pembimbing



Moh. Aris Munandar, S.sos., M.M
NIP 197207242000031001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Tijan M. Si.
NIP 196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 30 Maret 2020

Penguji I

Martien Herna Susanti S.Sos, M.Si.
NIP 197303312005012001

Penguji II

Nugraheni Arumsari, S.Sos., M.I.Kom
NIP 198502072014042001

Penguji III

Moh. Aris Munandar, S. Sos., M.M
NIP 197207242000031001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Dr. Moh. Soehatul Mustofa, M.A
NIP 196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat didalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Maret 2020



Eriana Fionita Nurfajila
NIM 3312416032

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui (QS Al Baqarah : 216). *Ya muqollibal quluub tsabbit qolbi ‘alaa diinik, zadanallah ilman wa hirsha.*”

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Almamater tercinta dan Bapak/Ibu Dosen Prodi Ilmu Politik, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
2. Bapak Anton Hendrawan dan Ibu Lili Indarwati yang selalu memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang tak terhingga kepada penulis.
3. Adik-adik tersayang Sefia Maharani, Mohamad Gibran dan Bunga Rayya Micellia yang selalu menjadi motivasi untuk terus belajar dan sukses.
4. Keluarga Besar saya dari Mbah Kakung Warso Miharjo dan Mbah Putri Siti Rochimah, serta Kakek Herwin yang selalu menjadi teladan bagi diri saya.
5. Keluarga Besar dan generasi penerus di Organisasi BEM KM UNNES Kabinet Inisiator Karya Tahun 2019, Sekolah Kader Bangsa (SKB) BEM KM UNNES Seluruh Angkatan, Komunitas Anti Korupsi (KAK) UNNES Seluruh Generasi, Mahasiswa Berprestasi FIS dan UNNES Tahun 2019, Prodi Ilmu Politik UNNES Seluruh Angkatan, Seluruh Santri Rumah Prestasi Ikhwah Rosul.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang mengambil judul “Komunikasi Politik Bupati Wing Chin terhadap KBSI (Keluarga Besar Sarekat Islam) di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2019”. Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, untuk itu penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada:

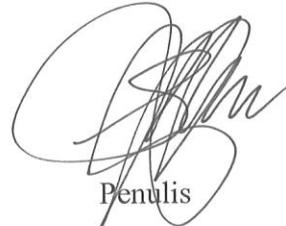
1. Prof. Dr. Fathur Rohman, M. Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah mengizinkan penulis menempuh studi di Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Moh. Solehatun Mustofa, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang telah mengizinkan penulis menempuh studi di Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Tijan M.Si., Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang atas kemudahan administrasi dalam menyelesaikan skripsi.
4. Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si dosen Wali yang telah membimbing selama kuliah di Universitas Negeri Semarang.

5. Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Penguji III Moh. Aris Munandar, S.Sos, M.M., yang telah memberikan arahan, bimbingan, petunjuk, motivasi, semangat dan dukungan dalam penyusunan skripsi.
6. Dosen Penguji I Martien Herna Susanti S.Sos, M.Si., yang telah memberikan arahan dan masukan sehingga dapat menyempurnakan skripsi ini.
7. Dosen Penguji II Nugraheni Arumsari, S.Sos., M.I.Kom yang telah memberikan arahan dan masukan sehingga dapat menyempurnakan skripsi ini.
8. Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah memberikan bekal dalam penyusunan skripsi ini.
9. Niken Diah Paramita, A.Md., selaku Tata Usaha Jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah membantu segala urusan administrasi dalam pembuatan skripsi.
10. Budhi Sarwono alias Wing Chin selaku Bupati Kabupaten Banjarnegara Periode 2017-2022, yang telah menjadi tokoh subjek dalam penelitian penulis.
11. H. Mushobihin, S.Ag., MM., Ketua DPC Sarekat Islam Banjarnegara, yang telah memberikan informasi selama penelitian sehingga membantu memudahkan skripsi ini.
12. Mustangin, S.Ip Sekretaris DPC Sarekat Islam Banjarnegara yang telah memberikan informasi selama penelitian sehingga membantu memudahkan skripsi ini.

13. Hakim, Pemuda Banjarnegara yang telah memberikan informasi selama penelitian sehingga membantu memudahkan skripsi ini.
14. Semua pihak yang telah membantu penyusunan Skripsi ini dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas do'a, dukungan dan bantuannya.

Penulis menyadari bahwa yang telah penulis sampaikan masih banyak kekurangan. Maka dari itu, penulis menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun untuk skripsi ini. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, Maret 2020



Penulis

SARI

Nurfajila, Erina Fionita. 2020. *Komunikasi Politik Bupati Wing Chin terhadap Keluarga Besar Sarekat Islam (KBSI) di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2019.* Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Moh. Aris Munandar, S.sos., M.M. 160 halaman.

Kata Kunci: Bupati Wing Chin, Komunikasi Politik, KBSI.

Komunikasi politik adalah pembicaraan yang bertujuan mempengaruhi kehidupan bernegara. Wing Chin merupakan orang etnis Tionghoa yang saat ini menjadi Bupati Kabupaten Banjarnegara Periode 2017-2022. Bupati memiliki peran sentral untuk menjalin komunikasi politik yang strategis dengan seluruh elemen masyarakat termasuk Sarekat Islam (SI). SI di Banjarnegara nilai-nilainya masih terjaga, terlebih dengan adanya ikatan Keluarga Besar Sarekat Islam (KBSI), maka komunikasi Bupati Wing Chin terhadap KBSI menjadi penting guna mempengaruhi dan mempertahankan komitmen bersama membangun Kabupaten Banjarnegara. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui komunikasi politik Bupati Wing Chin terhadap KBSI, (2) Mengetahui hambatan komunikasi politik Bupati Wing Chin terhadap KBSI.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banjarnegara. Analisis penelitian ini menggunakan Teori Komunikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data melalui wawancara (*interview*) dan analisis dokumen. Teknik analisis data dimulai dari menelaah seluruh data yang diperoleh, kemudian mereduksi data dan memilih data yang dibutuhkan, mengkodekan, rekonstruksi data, dan melakukan penafsiran data yang diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik Bupati Wing Chin terhadap KBSI meliputi: (1) Merawat Ketokohan dengan *Personal Branding* sebagai SI sejati dan menjalin silaturahmi dalam forum-forum diskusi nonformal bersama Tokoh KBSI Banjarnegara; (2) Memantapkan kelembagaan dengan memberikan ruang aspirasi KBSI Banjarnegara dan berkolaborasi dalam Program Pemerintah; (3) Menciptakan kebersamaan dengan keterlibatan aktif dilapangan dalam agenda-agenda KBSI Banjarnegara dan mengintergrasikan media dengan tindakan bagi Masyarakat KBSI Banjarnegara; (4) Membangun konsensus dengan bersahabat pada semua kalangan bersama KBSI Banjarnegara dan menyusun pesan persuasif bagi semua kalangan bersama KBSI Banjarnegara. Hambatan Komunikasi Politik meliputi: (1) Psikologis Bupati Wing Chin, (2) Perbedaan Keberpihakan dalam KBSI Banjarnegara, (3) Perbedaan kultur dan budaya dalam KBSI Banjarnegara.

Saran komunikasi yang dilakukan Bupati harus mampu memberikan fasilitasi kepada masyarakat untuk mengkritisi isu sebagai perwujudan suasana demokratis di Banjarnegara yang lebih hidup. Hal tersebut dapat menjadi bukti tingkat kredibilitas Bupati dalam pengetahuan dan adaptasi sosial kultural di Banjarnegara.

ABSTRACT

Nurfajila, Erina Fionita. 2020. *Political Communication of the Regent Wing Chin to the Sarekat Islam Large Family (KBSI) in Banjarnegara District, 2017-2019.* Skripsi. Department of Politics and Citizenship. Faculty of Social Sciences, Semarang State University. Supervisor Moh. Aris Munandar, S.sos., M.M. 160 pages.

Keywords: Regent Wing Chin, Political Communication, KBSI.

Political communication is a conversation aimed at influencing the life of the state. Wing Chin is an ethnic Chinese who is currently the Regent of Banjarnegara District 2017-2022 Period. The Regent has a central role to establish strategic political communication with all elements of society including Sarekat Islam (SI). SI values in Banjarnegara are still maintained, especially with the presence of the Sarekat Islam Large Family Association (KBSI), then the communication of the Regent of Wing Chin to KBSI is important in influencing and maintaining a shared commitment to develop the Banjarnegara Regency. The purpose of this study is (1) Knowing the political communication of the Regent of Wing Chin against KBSI, (2) Knowing the obstacles of political communication of the Regent of Wing Chin against KBSI.

This research was conducted in Banjarnegara Regency. This research analysis uses Communication Theory. The research method used is descriptive qualitative, data collection techniques through interviews (interviews) and document analysis. The data analysis technique starts from analyzing all the data obtained, then reducing the data and selecting the data needed, coding, reconstructing the data, and interpreting the data obtained.

The results showed that Wing Chin Regent's political communication towards KBSI included: (1) Caring for Personality with Personal Branding as a true SI and establishing friendship in non-formal discussion forums with KBSI Banjarnegara figures; (2) Strengthening institutions by providing KBSI Banjarnegara aspirations and collaborating in Government Programs; (3) Creating togetherness with active involvement in the field in the Banjarnegara KBSI agendas and integrating the media with action for the Banjarnegara KBSI Community; (4) Building consensus by friendly to all groups together with KBSI Banjarnegara and composing persuasive messages for all groups together with KBSI Banjarnegara. Barriers to Political Communication include: (1) Psychological District Head Wing Chin, (2) Differences in Partisanship in KBSI Banjarnegara, (3) Cultural and cultural differences in KBSI Banjarnegara.

The communication recommendations made by the Bupati must be able to provide facilitation to the public to criticize the issue as a manifestation of a more lively democratic atmosphere in Banjarnegara. This can be evidence of the Regent's level of credibility in socio-cultural knowledge and adaptation in Banjarnegara.

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA.....	vi
SARI.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
D. Batasan Istilah	9
1. Komunikasi Politik.....	9
2. Bupati Kabupaten Banjarnegara.....	9
3. KBSI (Keluarga Besar Sarekat Islam) Banjarnegara.	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	2
A. Deskripsi Teori.....	2
1. Komunikasi	2
2. Komunikasi Politik.....	18
3. Strategi Komunikasi Politik	24
4. Hambatan Komunikasi	33
B. Penelitian yang relevan	36
C. Kerangka Berfikir.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43

B. Latar Penelitian	44
C. Fokus Penelitian	45
D. Sumber Data.....	46
1. Sumber data primer	46
2. Sumber data sekunder	47
E. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	48
1. Metode observasi.....	48
2. Metode wawancara.....	49
3. Metode Dokumentasi	51
F. Uji Validitas Data.....	52
G. Teknik Analisis Data.....	54
1. Reduksi data	54
2. Penyajian data.....	55
3. Penarikan kesimpulan.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	139
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	139
1. Latar Belakang Kehidupan Bupati Wing Chin.....	139
2. Visi dan Misi menjadi Bupati Banjarnegara	58
3. Kedekatan dengan Keluarga Besar Sarekat Islam (KBSI) di Banjarnegara	62
4. Proses Bai'at Keluarga Besar Sarekat Islam (KBSI) di Banjarnegara ...	66
B. Hasil Penelitian	72
1. Komunikasi Politik Bupati Wing Chin terhadap Keluarga Besar Sarekat Islam (KBSI) di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2019.	72
2. Hambatan Proses Komunikasi Bupati terhadap Keluarga Besar Sarekat Islam (KBSI) di Kabupaten Banjarnegara.	89
C. Pembahasan.....	94
1. Komunikasi Politik Bupati Wing Chin terhadap Keluarga Besar Sarekat Islam (KBSI) Banjarnegara tahun 2017-2019.	94
2. Hambatan Komunikasi Politik Bupati Wing Chin terhadap Keluarga Besar Sarekat Islam (KBSI) Banjarnegara.	107
BAB V PENUTUP.....	113

A. Simpulan	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN.....	118

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Berpikir.....	42
Bagan 2. Model Triangulasi.....	53
Bagan 3. Teknik Analisis Data Milles and Hubberman.....	55
_Toc33031584	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Visi Misi.....	61
-------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bupati Wing Chin	139
Gambar 2. Keluarga Besar Sarekat Islam(KBSI)	62
Gambar 3. Bupati Wing Chin bersama Ketua DPC SI Banjarnegara di Pringgitan Rumah Dinas Bupati Banjarnegara.	82
Gambar 4. Bupati Wing Chin bersama dengan Ketua DPC SI Banjarnegara dalam penandatanganan NPHD Hibah.	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Penelitian.....	119
Lampiran 2. Skrip Wawancara Bupati Banjarnegara.....	129
Lampiran 3. Hasil Wawancara Sekjend SI Banjarnegara	134
Lampiran 4. Hasil Wawancara Pemuda SI Banjarnegara	144
Lampiran 5. Hasil Wawancara Pemda Banjarnegara.....	152
Lampiran 6. Hasil Wawancara Komunitas Guru Cokroaminoto Banjarnegara.	156
Lampiran 7. Biodata Bupati Wing Chin	159
Lampiran 8. Visi Misi dalam RPJMD	161
Lampiran 9. Pernyataan sikap Keluarga Besar Sarekat Islam (KBSI) Banjarnegara	175
Lampiran 10. SK Skripsi.....	176
Lampiran 11. Surat Ijin Penelitian Unnes.....	177
Lampiran 12. Surat Ijin Penelitian Kesbangpol	178
Lampiran 13. Dokumentasi Wawancara.....	179

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses sosial akan terjadi melalui adanya komunikasi, yang mana komunikasi ditujukan sebagai bentuk interaksi sosial yang akan memberikan dampak terhadap adanya pertukaran informasi saling mempengaruhi dan kontrol sosial. Lasswell (dalam Arifin 2011:6) telah membuat sebuah formula komunikasi, yakni siapa berkata apa, kepada siapa, melalui apa dan bagaimana efeknya (*who says what, to whom, with wha channel and with what effect*). Aspek yang menjadi sorotan tentang komunikasi adalah adanya suatu proses untuk mempengaruhi yang secara konkret mengandung unsur politik, hal ini tentu sejalan dengan salah satu unsur politik yakni adanya pengaruh. Sehingga komunikasi politik dapat diartikan sebagai dua mata keping uang yang tidak dapat dipisahkan akibat keterkaan istimewa diantaranya.

Sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh para ahli dikutip dari buku Anwar Arifin (2011:7) bahwa Lucian W. Pye (1963:6) mengatakan bahwa suatu jaringan (komunikasi) mampu memperbesar dan melipatgandakan ucapan-ucapan (pembicaraan) dan pilihan individual sehingga disini tidak akan ada suatu politik yang dapat merentangkan suatu bangsa. Selain itu Galnoor (1980:99) menulis bahwa tanpa komunikasi tidak akan mungkin ada usaha bersama dan dengan demikian tidak ada politik. Bahkan Anwar Arifin (1997) mengatakan bahwa negara Republik Indonesia didirikan dengan menggunakan komunikasi (politik) yaitu proklamasi dengan hanya dua kalimat pendek. Jalinan relasi dalam sebuah hubungan politik tentu harus dilakukan dengan

rapih dan sejalan dengan kepentingan yang berkeadilan. Hal inilah yang kemudian menjadi penting bagi setiap aktor untuk dapat menjadi komunikator dan politisi yang ideal dalam membentuk citra politik dan opini publik yang dapat memberikan dampak positif dalam hubungan timbal balik antara aktor dan masyarakat.

Selain membangun ketokohan, langkah strategis utama dan pertama yang harus dilakukan ialah memantapkan kelembagaan atau membesarkan lembaga. Lembaga tersebut meliputi wadah kerjasama beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam dunia politik dapat berupa partai politik, parlemen, dan pemerintahan atau birokrasi. Lembaga-lembaga nonpolitik pada dasarnya juga memiliki kekuatan politik meskipun kecil dan tentu tidak sama dengan kekuatan lembaga politik, contohnya adalah NGO (*Non Government Organization*) seperti sebuah perkumpulan, komunitas dan sebagainya. Berdasarkan pada paradigma pragmatis dalam komunikasi politik, ketokohan dan kemantapan lembaga dapat disebut sebagai tindakan politik yang bersifat nonverbal (Arifin 2011:241). Sehingga dapat ditemukan suatu korelasi bahwa ketokohan yang berkapabilitas serta kelembagaan yang kuat akan menjadi modal yang besar, terlebih publik sangat mengapresiasi lembaga yang dapat mengakomodir setiap kepentingan dan kebutuhannya. Citra yang terbentuk dari masyarakat akan muncul dari kontribusi yang diberikan oleh sebuah lembaga disamping pengelolaan kekuatan *Leadership* seorang pemimpin tetap berjalan sigap berdampingan.

Banjarnegara merupakan salah satu kabupaten yang mengikuti pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia yang dilaksanakan secara langsung pada tanggal 15 Februari 2017 untuk memilih calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten Banjarnegara periode 2017-2022. Pilkada yang dilaksanakan di kabupaten Banjarnegara menarik untuk dikaji karena calon yang berasal dari minoritas berhasil memenangkan Pemilihan Bupati Banjarnegara 2017. Budi Sarwono (Wing Chin) berhasil memenangkan pilkada dengan 285.117 suara. Budi Sarwono adalah pengusaha Tionghoa di Banjarnegara yang kesekian kalinya maju dalam kontestasi pilkada di Banjarnegara. Terdapat tiga kandidat yang mencalonkan diri sebagai calon bupati dan calon wakil bupati yaitu pasangan nomor urut satu Hadi Supeno dan Nur Heni Widyanti, pasangan nomor urut dua Wahyu Kristianto dan Saeful Muzda, pasangan nomor urut tiga Budhi Sarwono dan Syamsudin. Kho Wing Chin yang berketurunan Etnis Tionghoa ini Perjalanan karir Wing Chin selama hidupnya adalah sebagai pengusaha besar level Nasional.

Wing Chin merupakan Ketua Umum Asosiasi Aspal Beton Indonesia Provinsi Jawa tengah, Dewan Penasehat Gapensi Banjarnegara, Ketua DPP PITI Indonesia . Ia juga sebagai Owner PT Bumirejo yang berdomisili di Banjarnegara, Jawa Tengah. Usaha yang kian masyur tersebut menjadikan Wing Chin salah satu orang terkaya di Banjarnegara. Dalam karir politiknya Wing Chin pernah mencalonkan diri sebagai calon Bupati Banjarnegara pada pilkada 2011 maju lewat jalur independen dengan segala modal yang dia

miliki. Budhi Sarwono Kho Wing Chin adalah seorang mualaf yang masuk Islam pada 1998.

Terpilihnya Bapak Budhi Sarwono alias Wing Chin sebagai Bupati Kabupaten Banjarnegara dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Banjarnegara meskipun beliau berasal dari Etnis Tionghoa yang tergolong minoritas di wilayah Banjarnegara. Hal tersebut dapat dilihat dari antusiasme masyarakat dalam memberikan dukungan pada berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan. Agar jalannya proses pemerintahan dapat tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, tentu Bupati Wing Chin perlu menjalin kedekatan kepada seluruh masyarakat kabupaten Banjarnegara. Jalinan relasi tersebutpun dilakukan mulai dari kelompok-kelompok sosial, komunitas, maupun organisasi keagamaan. Organisasi masyarakat di banjarnegara yang memiliki basis besar adalah organisasi keagamaan, yakni muhammadiyah, NU dan Sarekat Islam. Menjadi menarik dalam relationship yang dilakukan oleh Bupati Wing Chin adalah berkaitan dengan eksistensi Masyarakat Sarekat Islam di Banjarnegara yang tergabung dalam sebuah komunitas KBSI (Keluarga Besar Sarekat Islam) Banjarnegara .

Sejarah memaparkan bahwa berdirinya Sarekat Islam guna menguatkan ekonomi umat islam yang kala itu perekonomian di Indonesia dikuasai besar-besaran oleh asing dan aseng sehingga berdirinya Sarekat Islam menjadi sebuah itikad yang kuat membangun basis islam secara politis, ekonomi dan sarana dakwah. Sarekat Islam dalam arti organisasi secara luas berdiri berlandaskan ekonomi dan politik. Seperti apa yang telah

digagas oleh HOS Tjokroaminoto. Gagasan guru bangsa tersebut, hingga kini masih dipertahankan oleh anggota SI secara umum di Indonesia. Hingga saat ini, gagasan ekonomi Tjokroaminoto dijadikan acuan oleh anggota SI dalam menjalankan bisnisnya atau dalam tujuan utama memperjuangkan Islam. Hal itu dapat dilihat dari bisnis-bisnis yang dijalankan oleh anggota SI di pusat (Jakarta) sampai daerah di daerah-daerah. Seperti di Kabupaten Banjarnegara, deretan toko yang terdapat di pusat kota beberapa dimiliki oleh anggota SI Banjarnegara. Bahkan, satu orang biasanya memiliki beberapa bisnis sekaligus. Konsep ekonomi yang digagas pendiri SI memang tidak kalah dengan strategi bisnis modern yang berasal dari luar Indonesia. Konsep tersebut yang menopang kelangsungan hidup Syarikat Islam di seluruh Indonesia. Selain itu, dari segi politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017, peran warga SI cukup besar.

Beberapa warga SI yang juga sebagai anggota beberapa Partai Politik turut berperan aktif sebagai Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Berdasarkan data, anggota SI tersebar dalam semua Pasangan Calon yang ada (3 pasangan calon). Namun, anggota SI paling banyak terdapat pada Pasangan Calon nomor urut 3 (Budhi Sarwono – Syamsudin) yang juga menjadi pemenang resmi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara dalam Pilkada Serentak 2017. Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon nomor urut 3 (Bendahara Partai Golkar Kabupaten Banjarnegara) adalah anggota SI. Juga Sekretaris Tim

Pemenangan yang juga Wakil Ketua PPP Kabupaten Banjarnegara adalah anggota SI. Kemudian beberapa anggota SI lain yang berperan dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal tersebut menjadi menarik bahwa, terdapat sebuah komunikasi politik antara Bupati Wing Chin dalam mempengaruhi dan mempertahankan komitmen bersama dengan KBSI untuk membangun Banjarnegara. Meski antara Etnis Tionghoa dan Sarekat Islam sempat memiliki sejarah *relationship* yang bersinggungan di masa lalu namun dengan prinsip keterbukaan yang dimiliki KBSI dengan mempertahankan hal-hal yang relevan dan meninggalkan hal-hal yang dirasa sudah tidak cocok dengan kondisi kebangsaan yang ada, menyebabkan masyarakat sarekat islam pada saat ini mampu berpartisipasi aktif dalam jalannya roda pemerintahan.

Komunikasi politik Bupati Wing Chin dalam mengelola ikatan dengan KBSI inilah yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini, yang kemudian dapat ditemukan sebuah pola dan strategi komunikasi dalam sistem politik di Banjarnegara agar dapat menjadi khasanah keilmuan baru bagi seluruh akademisi, pemerintah maupun masyarakat. Sehingga hal tersebut membuat penulis tertarik untuk mengetahui secara mendalam tentang komunikasi politik dan keterikatan antara Bupati Wing Chin dengan Sarekat Islam di Banjarnegara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana komunikasi politik yang dilakukan Bupati Wing Chin terhadap KBSI (Keluarga Besar Sarekat Islam)?
2. Apa yang menjadi penghambat komunikasi politik yang dilakukan oleh Bupati Wing Chin terhadap KBSI (Keluarga Besar Sarekat Islam)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui komunikasi politik Bupati Wing Chin terhadap KBSI (Keluarga Besar Sarekat Islam) di Banjarnegara.
- b. Memahami hambatan yang terjadi dalam proses komunikasi politik Bupati Wing Chin terhadap KBSI (Keluarga Besar Sarekat Islam) di Banjarnegara.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kajian Ilmu Politik mengenai strategi pelaksanaan komunikasi politik antar aktor pemerintah dengan komunitas lokal daerah. Hasil penelitian ini juga

diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian-kajian dan teori-teori yang berkaitan dengan Ilmu Politik, khususnya mengenai komunikasi politik antara pemilik kebijakan dengan *society actor*.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Bagi peneliti hasil penelitian ini dapat menambah ilmu dan pengalaman yang berkaitan dengan proses demokrasi secara substansial dari komunikasi politik Bupati Wing Chin terhadap Keluarga Besar Sarekat Islam Banjarnegara, sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran pelaksanaan kebijakan daerah yang membutuhkan sinergitas pada setiap elemen masyarakat.

2) Bagi Lembaga Pemerintah

Bagi Lembaga Pemerintah penelitian ini bertujuan untuk memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang belum berdasarkan analisis sosial dan membutuhkan sinergitas pada setiap elemen terkhusus antara aktor pemimpin dan kelompok masyarakat. Sehingga mampu menjadi perhatian khusus pemerintah untuk menjalin sinergitas dalam setiap keberlangsungan pelaksanaan pembangunan daerah.

3) Bagi Civitas Akademika

Bagi Civitas Akademika bertujuan untuk memahamkan elaborasi antara komunikasi politik dan partisipasi publik dengan substansi atau realitas di lapangan yang kemudian dapat menjadi temuan terkait

keterbutuhan kecakapan seorang aktor politik atau pemimpin untuk menjalin komunikasi yang baik dengan *society actor*.

4) Bagi Masyarakat

Bagi Masyarakat bertujuan untuk memberikan edukasi terhadap substansi demokrasi dalam pelaksanaan kebijakan publik sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan politik dalam masyarakat.

D. Batasan Istilah

1. Komunikasi Politik

Anwar Arifin (2011:8) komunikasi politik adalah pembicaraan yang bertujuan memengaruhi dalam kehidupan bernegara. Komunikasi Politik menjadi sasaran dalam penelitian ini, hal tersebut sebagaimana tujuan dari penelitian penulis yang mengulas tentang bagaimana komunikasi politik yang dilakukan oleh Bupati Wing Chin terhadap organisasi masyarakat yakni Keluarga Besar Sarekat Islam (KBSI) di Kabupaten Banjarnegara. Komunikasi politik yang diteliti dalam penulisan ini adalah berkaitan dengan pembicaraan politik Bupati Wing Chin untuk mempengaruhi Keluarga Besar Sarekat Islam (KBSI) dalam harmonisasi kehidupan beragama di Kabupaten Banjarnegara.

2. Bupati Kabupaten Banjarnegara

Bupati diartikan menurut UU No. 23 th 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah yang merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala daerah sebagaimana

dimaksud tersebut untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota. Kepala Daerah dalam penelitian ini adalah Bupati Kabupaten Banjarnegara. Bupati Banjarnegara yang bernama Budi Sarwono alias Wing Chin merupakan seorang kelahiran Banjarnegara, 27 November 1962 . Wing Chin memiliki latar belakang pendidikan SD Negeri II Krandegan, SMP Cokroaminoto dan SMA Cokroaminoto. Budi Sarwono adalah seorang mualaf yang masuk islam pada tahun 1998. Wing Chin merupakan warga dengan keturunan etnis Tionghoa yang sudah lama menetap di Kabupaten Banjarnegara dengan latar belakang keluarga pengusaha sebagaimana masyarakat keturunan tionghoa pada umumnya yang menguasai bidang usaha diberbagai daerah.

Perjalanan karir Wing Chin selama hidupnya adalah sebagai pengusaha besar level Nasional. Wing Chin merupakan Ketua Umum Asosiasi Aspal Beton Indonesia Provinsi Jawa tengah, Dewan Penasehat GAPENSI Banjarnegara, Ketua DPP PITI Indonesia. Wing Chin juga merupakan Owner PT Bumirejo yang berdomisili di Banjarnegara, Jawa Tengah. Usaha yang kian masyur tersebut menjadikan Wing Chin salah satu orang terkaya di Banjarnegara. Dalam karir politiknya Wing Chin pernah mencalonkan diri sebagai calon Bupati Banjarnegara pada Pilkada 2011 maju lewat jalur *independent*, namun belum berhasil. Kemudian pada Pilkada 2017 kembali mencalonkan diri sebagai Bupati berpasangan dengan Syamsudin yang berkoalisi dengan Partai Golkar dan PPP.

3. KBSI (Keluarga Besar Sarekat Islam) Banjarnegara.

Keluarga Besar Sarekat Islam (KBSI) menjadi sebuah istilah baru dikalangan masyarakat Sarekat Islam terutama di Kabupaten Banjarnegara. Terbentuknya KBSI berawal dari sebuah diskusi kecil dengan beberapa generasi muda serta hasil silaturahmi yang dilaksanakan secara bertahap dengan melibatkan senior dan tokoh SI di Kabupaten Banjarnegara sehingga dapat menjadi sebuah diskusi dan pembelajaran terhadap berbagai persoalan. Hal tersebut tentu menjadi peluang bertambahnya laju organisasi KBSI agar dapat meningkatkan kualitas dengan penuh kesadaran akan kondisi dan situasi yang tengah terjadi dalam dinamika kehidupan politik di Banjarnegara, sehingga keberadaan KBSI menjadi keterbutuhan bagi kalangan masyarakat sarekat islam di Banjarnegara. Tujuan utama dari adanya KBSI adalah untuk menyongsong kejayaan sarekat islam kembali di Indonesia secara umum dan di Banjarnegara secara khusus, yang tentu bukan untuk kepentingan sesaat namun agar organisasi sarekat islam dapat jauh lebih baik dan lebih bermanfaat di tengah laju pembangunan yang pesat terutama dalam persoalan keummatan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Komunikasi

a. Pengertian Komunikasi

Istilah atau kata “komunikasi “ yang berasal dari Bahasa Latin yakni “*communicates*” atau “*communication*” atau “*communicare*” memiliki makna berbagi atau “menjadi milik bersama”. Sehingga dapat diartikan bahwa komunikasi menurut Bahasa mengacu pada suatu upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan (Murtadi, dk., 2015:1). Hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh Zainul Ma’arif dalam bukunya yang berjudul “Logika Komunikasi” bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian dan penerimaan pesan oleh manusia dengan sarana tertentu dengan konsekuensi tertentu. Proses penyampaian pesan tersebut disampaikan oleh seorang komunikator kepada seorang komunikan. Disini lain sarana untuk menyampaikan dan menerima pesan merupakan hal-hal yang melekat pada diri baik meliputi pengetahuan dan teknologi yang kemudian memiliki konsekuensi berupa pesan yang dikirim atau diterima bisa sesuai atau tidak sesuai dengan yang diharapkan (Maarif,2016:14).

Sehingga dari berbagai pengertian komunikasi tersebut dapat diartikan komunikasi sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh seorang individu maupun kelompok untuk menyampaikan pesan melalui media-

media tertentu baik lisan maupun tulisan dengan tujuan untuk mendapatkan timbal balik (*feedback*).

b. Jenis Komunikasi

Kemudian sebuah Komunikasi dapat digolongkan menjadi tiga jenis (Effendi, 2003:57), yakni:

- 1) *Komunikasi Persona*, merupakan komunikasi yang ditujukan kepada sasaran tunggal. Hal tersebut dapat berwujud anjingsana, tukar pikiran, dan sebagainya. Komunikasi persona memiliki efektivitas paling tinggi karena komunikasinya timbal balik dan terkonsentrasi.
- 2) *Komunikasi Kelompok*, merupakan komunikasi yang ditujukan kepada kelompok tertentu. Kelompok tersebut adalah suatu kumpulan manusia yang mempunyai hubungan sosial yang nyata dan memperlihatkan struktur yang nyata pula. Wujud dari komunikasi kelompok ini berupa: briefing, penyuluhan, indoktrinasi, penataran, dan sebagainya.
- 3) *Komunikasi Massa*, merupakan komunikasi yang ditujukan kepada massa atau komunikasi yang menggunakan media massa. Massa disini merupakan kumpulan orang-orang yang hubungan antar sosialnya tidak jelas dan tidak mempunyai struktur tertentu

c. Komponen-komponen Komunikasi

Dalam ilmu komunikasi juga terdapat komponen-komponen komunikasi sebagaimana disampaikan oleh Lasswell (dalam Murtiadi, dkk., 2015:3) bahwa lima komponen dalam komunikasi, antara lain:

- 1) Siapa (pelaku komunikasi pertama yang menjadi inisiator atau sumber).
- 2) Mengatakan apa (isi pesan yang disampaikan).
- 3) Kepada siapa (pelaku komunikasi lainnya yang menjadi objek atau penerima).
- 4) Melalui saluran apa (alat/saluran penyampaian informasi) dengan akibat/hasil apa (hasil */feedback* yang terjadi pada diri penerima).

d. Unsur-unsur Komunikasi

Dalam Buku yang berjudul “Pengantar Studi Ilmu Komunikasi” karya Prof. Drs. H.A.W Widjaja (2000:30-38) memaparkan bahwa terdapat 6 unsur dari komunikasi, yakni:

1) Sumber

Sumber merupakan dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan tersebut. Sumber dapat berupa orang, lembaga, buku, dan dokumen, dan sebagainya.

2) Komunikator

Berkomunikasi menjadikan setiap orang ataupun sekelompok orang dapat menyampaikan pesan komunikasi itu sebagai suatu proses,

yangmana komunikator dapat menjadi komunikan, begitupun sebaliknya komunikan dapat menjadi komunikator.

3) Pesan

Pesan merupakan keseluruhan terhadap apa yang disampaikan oleh komunikator. Pesan mempunyai inti pesan (tema) yang sebenarnya menjadi pengarah di dalam usaha mencoba mengubah sikap dan tingkah laku komunikan. Pesan dapat secara panjang lebar mengupas berbagai bidang, namun inti pesan dari komunikasi akan selalu mengarah kepada tujuan akhir komunikasi tersebut. Sedangkan bentuk dari pesan terdapat tiga jenis, yakni:

- a) *informatif*, yakni memberikan keterangan-keterangan (fakta) kemudian komunikan mengambil kesimpulan dan keputusan sendiri.
- b) *persuasif*, merupakan bujukan, atau membangkitkan pengertian dan kesadaran manusia bahwa apa yang disampaikan akan memberikan perubahan sikap, tetapi perubahan ini adalah atas kehendak sendiri (bukan terpaksa).
- c) *koersif*, yakni penyampaian pesan yang bersifat memaksa dengan menggunakan sanksi-sanksi apabila tidak dilaksanakan.

4) Channel/Saluran

Channel merupakan saluran penyampaian pesan, atau bisa juga disebut dengan media. Media komunikasi dapat dikategorikan dalam 2 bagian yakni:

(a) *Media umum*, merupakan media yang dapat digunakan oleh segala bentuk komunikasi, contohnya radio CB, OHP, dan sebagainya;

(b) *Media massa*, merupakan media yang digunakan untuk komunikasi secara massal, contohnya pers, radio, film, dan televisi.

5) Komunikasikan

Komunikasikan merupakan pihak yang menerima pesan atau informasi dari komunikator. Pelaku penerima informasi ini bisa seorang individu maupun organisasi.

6) Efek/timbal balik (feedback)

Efek adalah hasil akhir dari suatu komunikasi, yakni sikap dan tingkah laku orang, sesuai atau tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Efek dibagi menjadi tiga, yakni:

a) *Personal Opinion*, merupakan akibat/hasil yang diperoleh dari komunikasi yang merupakan sikap dan pendapat seseorang terhadap sesuatu masalah tertentu.

b) *Public Opinion*, merupakan penilaian sosial mengenai sesuatu hal yang penting dan berarti, atas dasar pertukaran pikiran yang dilakukan individu-individu secara sadar dan rasional

c) *Majority Opinion* atau pendapat terbesar dari publik atau masyarakat adalah sesuatu yang harus dicapai dalam kampanye pemilu. Berhasil atau tidaknya suatu kampanye dapat diukur

dari berhasil atau tidaknya suatu capaian mayoritas dalam hasil pemilu dan seterusnya.

e. Proses dan Ruang Lingkup Komunikasi

Tahap-tahap dari proses komunikasi menurut Cutlip dan Center terdapat empat tahap (Widjaja, 2000:39). Keempat tahap tersebut adalah sebagai berikut:

1) *Fact Finding*

Mencari dan mengumpulkan fakta dan data sebelum seseorang melakukan kegiatan komunikasi. Sebagaimana ketika kita berbicara didepan masyarakat tertentu perlu dicari fakta dan data tentang masyarakat tersebut yang meliputi keinginannya, komposisinya, dan sebagainya.

2) *Planning*

Ketika telah menemukan fakta dan data dari suatu rancangan komunikasi maka harus segera membuat rencana tentang apa yang akan dikemukakan dan bagaimana mengemukakannya. Misalnya dihadapan kalangan masyarakat agraris tentu saja dalam mengemukakan gaya komunikasi haruslah menggunakan cara yang sesuai dengan kekhasan atau ciri-ciri masyarakat agraris.

3) *Communicating*

Kemudian setelah *planning* tersusun, maka tahap yang selanjutnya adalah *communicating*/berkomunikasi.

4) *Evaluation*

Evaluasi merupakan kegiatan menilai dan menganalisis kembali yang diperlukan untuk melihat bagaimana hasil dari komunikasi tersebut. Hal ini menjadi bahan bagi perencanaan selanjutnya.

Selain daripada proses komunikasi, hal yang harus diperhatikan pula adalah ruang lingkup dari komunikasi itu sendiri. Sebagaimana disampaikan oleh Murtiadi (2015:10) dalam bukunya yang berjudul “Psikologi Komunikasi”, ruang lingkup dan sistematika komunikasi dibagi menjadi 4, yakni: sistem komunikasi intrapersonal, sistem komunikasi interpersonal, sistem komunikasi kelompok, dan sistem komunikasi massa.

2. Komunikasi Politik

a. Pengertian Komunikasi Politik

Kata komunikasi dengan komunikasi politik tentu memiliki makna yang berbeda. Namun kata komunikasi yang dielaborasi dengan kata politik pada dasarnya kedua hal tersebut memiliki keterkaitan yakni komunikasi mencakupi politik dan politik mencakupi komunikasi, sehingga keduanya berjalan layaknya dua sisi mata uang yang tidak dapat dipaksakan. Kedua hal itulah yang kemudian memunculkan istilah komunikasi politik (*political communication*). Dalam buku Anwar Arifin (2011:8) menjelaskan bahwa komunikasi dan politik menjadi komunikasi politik, sebagaimana diuraikan di muka pada hakikatnya berpadu atau bertemu pada dua titik yaitu: pembicaraan dan

pengaruh atau mempengaruhi. Politik adalah pembicaraan sebagai salah satu bentuk komunikasi. Sebaliknya komunikasi adalah politik karena hampir semua komunikasi bertujuan mempengaruhi sebagai salah satu dimensi politik. Sehingga dapat dirumuskan bahwa komunikasi politik adalah pembicaraan yang bertujuan memengaruhi dalam kehidupan bernegara. Hal tersebut sama seperti yang dijelaskan oleh Dan Nimmo (1999) yang memandang bahwa “*communication cover the politic*” karena politik melibatkan pembicaraan dalam arti yang panjang dan luas sehingga hakikat aplikasi atau pengalaman politik adalah kegiatan berkomunikasi antara orang-orang (Arifin, 2011:11). Demikianlah sebab dari ilmuwan politik seperti Mark Roelofs (1967) juga turut mengatakan bahwa “*politic is conversation*” atau kegiatan politik adalah kegiatan berbicara yang dilakukan oleh para komunikator politik yaitu politikus, aktivis, dan professional. Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Sari (2013:7) yang menyebutkan bahwa komunikasi politik adalah proses pertukaran pesan-pesan politik diantara komunikator politik, propaganda dan kampanye politik.

b. Tujuan Komunikasi Politik

Adapun tujuan dari komunikasi politik menurut Prof. Dr. Anwar Arifin (2011:177-231) yakni untuk memperoleh citra politik, opini publik, partisipasi politik dan kebijakan politik, serta memenangkan pemilu (pemilihan umum). *Opini Publik*, merupakan (1) pendapat, sikap, perasaan, ramalan, pendirian, harapan rata-rata individu kelompok dalam

masyarakat perihal sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum atau persoalan persoalan sosial; (2) hasil interaksi, diskusi atau penilaian sosial antar individu yang berdasarkan pertukaran pikiran yang sadar dan rasional yang dinyatakan baik lisan maupun tulisan; (3) isu atau masalah yang didiskusikan adalah hasil dari apa yang diperoleh dari media massa (media cetak maupun media elektronik); (4) opini yang hanya dapat berkembang pada negara yang menganut demokrasi. *Citra Politik* merupakan konstruksi atas representasi dan persepsi khalayak terhadap individu, kelompok atau Lembaga terkait, dalam kiprahnya untuk masyarakat. *Partisipasi politik dan Kebijakan politik* merupakan keterlibatan setiap individu dalam bermacam-macam tindakan dalam kehidupan politik *Pemilu (pemilihan umum)* merupakan salah satu tujuan komunikasi politik yakni untuk memenangkan pemilu yang diperoleh dari kampanye politik yakni komunikasi secara *persuasive* kepada masyarakat dengan retorika, *public relations*, pemasaran politik, lobi dan tindakan politik.

Pembicaraan politik menurut Bell (dalam Arifin 2011:5) adalah pembicaraan tentang kekuasaan, pembicaraan tentang pengaruh, dan pembicaraan tentang otoritas, kemudian Nimmo (1999) menambahkan lagi satu pembicaraan dalam politik yakni pembicaraan tentang konflik, karena melalui pembicaraan para komunikator politik menyelesaikan perselisihan-perselisihan mereka, kendatipun tidak pernah menyeluruh. Tak salah jika Arifin menambahkan lagi dua pembicaraan politik yaitu

pembicaraan tentang konsensus atau kompromi dan pembicaraan tentang kerjasama dengan sebuah konsensus atau kompromi melalui pembicaraan politik. demikian juga upaya menjalin kerjasama (*cooperation*) dijalin melalui pembicaraan politik.

c. Bentuk Komunikasi Politik

Sebelum kita menguasai komunikasi politik seorang komunikator harus memahai terlebih dahulu bentuk-bentuk Komunikasi Politik. Beberapa bentuk seni atau teknik aplikasi (penerapan) komunikasi politik yang sudah lama dikenal dan diterapkan oleh para politikus atau aktivis politik antara lain sebagai berikut sebagaimana yang disampaikan oleh Anwar Arifin (2011:125):

1) Retorika Politik

Retorika berasal dari bahasa Yunani yakni "*rhetorica*" yang memiliki arti seni berbicara. Pada awalnya retorika adalah komunikasi yang bersifat dua arah atau dialogis yakni antara individu dengan individu lain. Retorika juga dapat berlangsung satu orang berbicara kepada satu orang atau beberapa orang guna saling memengaruhi dengan cara persuasif dan timbal balik (dua arah). Dalam perkembangannya retorika telah menjadi suatu kegiatan (juga ilmu pengetahuan) seseorang dalam menyatakan perasaan dan pikirannya dengan lisan kepada khalayak (publik atau massa). Retorika politik sebagai suatu seni berbicara, memiliki daya persuasi

politik yang sangat tinggi, dengan menggunakan bahasa lisan yang indah (irama, mimik, dan intonasi suara).

2) Agitasi Politik

Agitasi berasal dari Bahasa Latin yaitu “*agitare*” yang berarti bergerak atau menggerakkan. Dalam bahasa Inggris yaitu “*agitation*” merupakan salah satu bentuk seni dan teknik dalam berkomunikasi yang sering diaplikasikan dalam kegiatan politik. Agitasi merupakan suatu upaya untuk menggerakkan massa secara lisan maupun tulisan, dengan cara menghidupkan dan membangkitkan emosi publik. Agitasi juga berusaha agar publik bersedia memberikan pengorbanan yang besar untuk mencapai tujuan juga bersedia mengorbankan jiwa untuk mewujudkan sebuah cita-cita politik.

3) Propaganda Politik

Propaganda berasal dari Bahasa Latin “*propagare*” yang memiliki makna menyemaikan tunas suatu tanaman, Hal tersebut merupakan salah satu bentuk seni dan teknik dalam berkomunikasi yang sering kali diaplikasikan dalam kegiatan politik. Anwar Arifin dalam bukunya menjelaskan bahwa propaganda politik merupakan suatu kegiatan komunikasi politik yang dilakukan secara terencana dan sistematis, dengan menggunakan sugesti (mempermainkan emosi), bertujuan untuk memengaruhi seseorang atau kelompok orang, khalayak atau komunitas yang lebih besar (bangsa) agar

melaksanakan atau menganut suatu ide (ideologi, gagasan sampai sikap), atau kegiatan tertentu dengan kesadarannya sendiri tanpa ada keterpaksaan.

4) Lobi Politik

Kata lobi secara istilah merupakan tempat para tamu menunggu atau berbincang-bincang santai di hotel. Kemudian, karena tempat itu banyak dipakai oleh para politikus melakukan pembicaraan politik secara santai atau informal, istilah lobi politik itu kemudian melekat sebagai suatu kegiatan politik yang sangat penting. Meskipun pembicaraan politik yang bersifat dialogis, tatap muka atau antarpersona tidak lagi dilakukan di lobi hotel, namun kegiatan itu sudah dinamakan lobi politik. Anwar Arifin dalam bukunya menjelaskan bahwa lobi politik merupakan forum pembicaraan politik yang dalam perspektif atau paradigma interaksional dalam komunikasi politik diterapkan dalam bentuk komunikasi antarpersona atau tatap muka, yang bersifat dialogis. Dalam lobi politik pengaruh individu pribadi sangat penting, hal tersebut meliputi kompetensi, penguasaan masalah, jabatan dan kepribadian (kharisma) politikus yang menjadi sangat berpengaruh.

5) Tindakan Politik

Berbeda dengan jenis komunikasi yang lainnya seperti lobi politik, retorika politik, dan kampanye politik yang merupakan peristiwa-peristiwa politik yang dapat diamati dari waktu ke waktu, dalam

waktu yang lama hingga membentuk pola. Hingga dalam paradigma pragmatis komunikasi politik disebutkan bahwa politikus yang selalu melakukan lobi politik disebut sebagai pelobi karena tindakan melobi telah terpola bagi dirinya. Dengan demikian lobi politik, retorika politik, dan kampanye politik disebut juga tindakan politik, dan merupakan salah satu bentuk komunikasi politik, namun komunikasi politik dari tindakan politik bersifat nonverbal. Hal tersebut dapat juga sebagai informasi politik, terutama karena semua tindakan itu tidak boleh dipahami sebagai pesan, melainkan sebagai kemungkinan yang dapat diprediksi berdasarkan pola. Tindakan politik dalam peristiwa komunikasi politik bertujuan untuk membentuk citra (*image*) politik bagi khalayak (masyarakat), yaitu gambaran mengenai realitas politik yang memiliki makna.

3. Strategi Komunikasi Politik

Kajian komunikasi politik tentu tidak terlepas dari adanya strategi didalamnya, setidaknya dalam sebuah strategi ilmu politik harus merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan. Hal tersebut dikarenakan keduanya memiliki *standing position* yang kuat terhadap masyarakat yang mempengaruhi komunikasi politik. Selain itu, hal yang paling krusial adalah diperlukannya kemampuan dan dukungan lembaga dalam menyusun pesan politik, menetapkan metode dan memilih media politik yang tepat.

Anwar Arifin (2011:235) dalam bukunya yang berjudul “Komunikasi Politik”, ia menjelaskan bahwa strategi komunikasi politik

nerupakan keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan saat ini, guna mencapai tujuan politik pada masa depan. Merawat ketokohan, memantapkan kelembagaan politik, menciptakan kebersamaan dan membangun konsensus merupakan keputusan strategis yang tepat bagi komunikator politik.

a. Merawat Ketokohan dan Memantapkan Kelembagaan.

Kajian dalam komunikasi politik, terutama keterampilan retorika politik atau pidato politik seseorang di hadapan massa, pada hakikatnya akan dilihat terlebih dahulu siapa tokoh politik yang berbicara tersebut dibandingkan apa pesan politik yang hendak disampaikan. Hal tersebut bermakna bahwa khalayak akan tertarik bukan pada apa isi pidato, melainkan kepada tokoh politik yang akan tampil untuk berpidato. Dengan demikian membuktikan bahwa ketokohan adalah hal yang sangat utama dalam komunikasi politik. Betapa pentingnya faktor personal untuk dapat cakap dalam beretorika terutama yang berkaitan dengan masalah karakter yang disebut sebagai etos, yakni gabungan antara kredibilitas, atraksi dan kekuasaan atau dalam literature ilmu komunikasi etos diartikan sebagai kredibilitas komunikator yakni komunikator yang dapat dipercaya.

Berlo (dalam Canggara, 2008:44) menyampaikan melalui bukunya yang berjudul '*The process of communication: an introduction to theory and practice*' memaparkan bahwa kredibilitas seseorang akan muncul bila memiliki hal-hal sebagai berikut:

- 1) *Communication skill*, yakni keterampilan berkomunikasi.
- 2) *Knowledge*, yakni pengetahuan yang luas tentang substansi yang disampaikan.
- 3) *Attitude*, yakni sikap jujur dan bersahabat.
- 4) *Social and cultural system*, yakni mampu beradaptasi dengan *system* sosial budaya.

Hafied Canggara (2008:92) mengemukakan pendapat James McCroskey (1962) bahwa hal yang sama berkaitan dengan kredibilitas yang dimiliki oleh seseorang. Bahwa setidaknya seseorang harus memiliki hal seperti dibawah ini agar mendapatkan predikat *credible* dalam masyarakat:

- 1) *Competence*, yakni kemampuan atau penguasaan terhadap substansi yang disampaikan.
- 2) *Attitude*, yakni sikap tegas pada prinsip.
- 3) *Intention*, yakni tujuan yang baik.
- 4) *Personality*, yakni kepribadian yang hangat dan bersahabat.
- 5) *Dynamism*, yakni dinamika yang menunjukkan cara penyajian yang menarik dan tidak membosankan.

Selain daripada dimilikinya kredibilitas dalam sosok seorang pemimpin untuk mempertahankan pengaruhnya, penting lagi untuk memiliki adanya citra diri dalam setiap individu. Citra diri seseorang dapat terbentuk melalui pengalaman langsung, yakni melalui pergaulan

dan aktivitas yang lama dengan tokoh politik atau komunikator itu sendiri. Selain itu, citra diri bagi khalayak dapat juga timbul bila diperkenalkan oleh seseorang yang sudah populer atau orang yang lebih memiliki kekuasaan dan kharisma. Berkaitan dengan hal tersebut tadi, ketokohan juga dapat terbangun melalui daya tarik fisik tubuh, busana, dukungan fisik lainnya, yang bersifat nonverbal dalam komunikasi.

Berdasarkan teori hemofili, persamaan-persamaan yang dimiliki antara para komunikator politik akan mempermudah interaksi dan menimbulkan efek yang positif. Selain daripada hal tersebut, keakraban atau hubungan yang baik antara komunikator politik dengan masyarakat merupakan hal yang penting dalam proses efektifitas komunikasi politik. Keakraban tersebut bisa dicapai jika komunikator dengan masyarakat memiliki banyak persamaan, terutama dalam nilai-nilai, pendidikan, status, dan sebagainya.

Hal yang paling penting setelah adanya ketokohan maka adanya kemantapan secara kelembagaan yang dapat meliputi partai politik, parlemen, pemerintahan atau birokrasi. Citra diri yang telah dimiliki oleh seseorang terkadang seringkali dikaitkan dengan Lembaga yang ada dibelakangnya. Masyarakat mampu mengidentifikasi seseorang dengan partai politik tertentu maupun komunitas tertentu meski sebenarnya diri pribadi dari seorang tersebut tidak merasa menyukai aktivitas dari komunitas tersebut. Dalam memenuhi kepentingan dari masyarakat, kelembagaan secara perlahan akan membangun karakter dan kepribadian

yang akan menjadi dasar lahirnya kredibilitas atau kepercayaan bagi publik. Dengan kata lain, karakter atau kepribadian suatu lembaga merupakan sumber untuk memperoleh kredibilitas itu. Demikian juga penampilan lembaga secara fisik merupakan daya tarik tersendiri yang bersifat nonverbal dalam komunikasi politik.

b. Menciptakan kebersamaan.

Tahap selanjutnya adalah tentang bagaimana mampu menciptakan kebersamaan antara politikus dan masyarakat dengan cara mengenal yang menjadi kekhasan dari masyarakat dan menyusun pesan yang hemofili. Hal tersebut sangat diperlukan agar komunikator politik dapat melakukan empati (mampu menempatkan diri). Suasana hemofili yang harus diciptakan adalah persamaan bahasa (simbol komunikasi), busana, kepentingan, terutama mengenai pesan politik dan media politik serta yang paling penting adalah siapa tokoh yang melakukan komunikasi dengan masyarakat.

Anwar Arifin (2011:244) dalam bukunya menyebutkan bahwa diantara komponen psikologi, yang meliputi keyakinan, kepentingan, dan motivasi masyarakat, baik itu yang bersifat politik maupun nonpolitik, ternyata yang kuat pengaruhnya pada diri masyarakat adalah keyakinan atau ideologi, termasuk agama dan tradisi. Menurut Lasswell, terdapat tiga bentuk pengaruh kelompok yakni sebagai berikut:

- 1) *Attention Area*, merupakan bidang dimana perhatian individu identik dengan masyarakat. Hal yang menjadi pokok persoalan adalah

bagaimana seseorang mengambil tindakan terhadap suatu persoalan yang sama atau berbeda dengan tindakan masyarakat.

- 2) *Public Area*, merupakan bidang yang memberi pengaruh terhadap seseorang karena adanya keterikatan psikologis yang amat kuat antara kelompok dan individu.
- 3) *Sentiment Area*, merupakan sesuatu yang dalam diri seseorang yang terdapat ikatan-ikatan sangat sukar untuk dijelaskan dan hanya dirasakan kebenarannya saja.

Agar pesan politik yang disampaikan dapat sesuai dengan yang diharapkan oleh komunikator, maka penyampaiannya harus secara persuasif agar mudah mendapatkan timbal balik (*feedback*). Menurut Wilbur Schramm (1955) dalam buku Anwar Arifin (2011:249) menyebutkan bahwa syarat-syarat berhasilnya suatu pesan disampaikan dengan baik, yakni sebagai berikut:

- 1) Pesan direncanakan dan disampaikan sedemikian rupa sehingga pesan itu dapat menarik perhatian kalayak
- 2) Pesan dibuat menggunakan tanda-tanda yang sudah atau mudah dikenal oleh komunikator dan komunikan sehingga kedua pengertian itu bertemu
- 3) Pesan berisi tentang sesuatu yang membangkitkan kebutuhan pribadi daripada sasaran dan menyarankan agar cara-cara tersebut dapat mencapai kebutuhan itu

- 4) Pesan memiliki isi untuk memberikan saran tentang suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan yang layak bagi khalayak. Sehingga suatu pesan politik hanya akan menarik perhatian selama ia memberikan harapan atau hasil yang kuat relevansinya dengan persoalan kebutuhan.

Penyampaian pesan-pesan politik seorang komunikator harus memilih metode penyampaian dan metode menyusun isi pesan politik yang sesuai. Hal tersebut sebagaimana Anwar Arifin menyebutkan dalam bukunya tentang beberapa metode komunikasi yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi dan situasi khalayak/masyarakat, yakni:

- 1) *Redundancy* atau *repetition*, dapat diartikan sebagai upaya memengaruhi dengan jalan mengulang-ulang pesan politik kepada masyarakat seperti yang dilakukan dalam iklan perusahaan yang menawarkan barang dan jasa di dalam siaran radio dan televisi.
- 2) *Informatif*, yakni isi pesan yang memiliki tujuan memengaruhi masyarakat dengan cara (metode) memberikan penerangan. Artinya, menyampaikan suatu pesan yang sesuai dengan fakta-fakta, data dan pendapat-pendapat yang benar. Penerangan mempunyai fungsi (1) memberikan informasi tentang fakta semata-mata juga fakta yang bersifat kontroversial, atau (2) memberikan informasi atau menuntun khalayak ke arah suatu pendapat.
- 3) *Persuasif*, yakni memengaruhi masyarakat dengan cara membujuk. Metode ini merupakan suatu cara untuk memengaruhi masyarakat

dengan jalan tidak memberi kesempatan untuk berpikir kritis, bahkan kalau perlu khalayak itu dapat terpengaruh secara tidak sadar (sugesti).

- 4) *Edukatif*, yakni usaha untuk memengaruhi masyarakat dari suatu pernyataan politik yang dilontarkan, yang dapat diwujudkan dalam bentuk pesan yang akan berisi pendapat, fakta, dan pengalaman.
- 5) *Koersif*, yang berarti memengaruhi masyarakat dengan cara memaksa. Dalam hal ini, masyarakat dipaksa, tanpa perlu berpikir lebih banyak untuk menerima gagasan yang dilontarkan.

Bagian terakhir dari upaya membangun kebersamaan adalah memilah dan memilih media. Media terdiri atas yang dapat dilihat oleh mata (visual media) misalnya surat kabar, majalah, poster, dan spanduk serta media yang hanya dapat didengar saja, misalnya radio, telepon, sirene, dan gendang. Selain daripada itu, terdapat juga media yang dapat ditangkap oleh mata dan telinga sekaligus bahkan kelihatan hidup (*audio-visual media*), seperti film dan televisi, serta media interaktif melalui jaringan komputer (*internet*) atau sering disebut *cyber media*. Tentunya penggunaan media-media tersebut diterapkan sesuai dengan kebutuhan yakni menyesuaikan dengan kondisi dari masyarakat. Hal tersebut guna memaksimalkan manfaat dari upaya penyampaian pesan melalui media secara tepat.

c. Membangun Konsensus.

Membangun konsensus dalam strategi komunikasi politik yakni menjalin hubungan baik antara para politikus dalam suatu partai politik maupun antara para politikus dari partai yang berbeda. Dalam upaya membangun konsensus, seorang politikus atau aktivis harus memiliki kemampuan berkompromi, yakni merupakan suatu seni atau kiat berkompromi itu pada umumnya merupakan bakat atau bawaan lahir dan pasti dimiliki oleh seorang politikus. Sebagai suatu seni, pada dasarnya membangun konsensus melalui lobi merupakan bakat yang dibawa sejak lahir, tetapi tetap dapat dipelajari baik melalui pendidikan formal, informal, dan nonformal maupun pengalaman sebagai politikus atau aktivis. Para politikus yang akan melakukan lobi untuk mencari solusi dengan membangun konsensus harus memulai dengan kesediaan membuka diri.

Selain daripada itu, ada juga beberapa faktor yang mendorong lahirnya kesediaan membuka diri, yakni adanya kesamaan karakteristik personal, daya tarik fisik, *familiarity*, kedekatan, dan kemampuan. Hasil studi menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki persamaan karakteristik personal, seperti kesamaan nilai-nilai, sikap, keyakinan, tingkat sosioekonomi, agama, ideologi, atau partai politik cenderung saling menyukai (Arifin, 2011:266).

4. Hambatan Komunikasi

Hambatan-hambatan dalam komunikasi menurut Onong Uchjana Effendy dalam bukunya yang berjudul dinamika komunikasi (2009 : 11) terdiri dari :

a. Hambatan Sosio-antro-psikologis

Proses komunikasi berlangsung dalam konteks situasional. Sehingga komunikator harus memperhatikan situasi ketika komunikasi berlangsung, sebab situasi amat berpengaruh terhadap kelancaran komunikasi, terutama situasi yang berhubungan dengan faktor-faktor sosiologis antropologis-psikologis.

Hambatan secara sosiologis berasal dari adanya perbedaan berbagai golongan dan lapisan yang menimbulkan perbedaan status, ideologi agama, status ekonomi yang berpotensi dapat menjadi hambatan bagi kelancaran informasi.

Hambatan secara antropologis yakni yang berasal dari multikulturalisme budaya dalam masyarakat. Sebagai contoh yakni terdapat kata-kata yang sama bunyinya dan tulisannya, tetapi memiliki makna yang berbeda disetiap daerahnya, sehingga apabila seorang komunikator tidak dapat menguasai analisis antropologis hal tersebut dapat menjadi hambatan dalam komunikasi.

Terdapat tiga faktor psikologis yang hambatan dalam berkomunikasi (Suprpto, 2009 :14) yakni:

1. *Selective attention*. Orang biasanya cenderung untuk mengekspos dirinya hanya kepada hal-hal (komunikasi) yang dikehendakinya. Misalnya, seseorang tidak berminat membeli mobil, jelas dia tidak akan berminat membaca iklan jual beli mobil.
2. *Selective perception*. Ketika seseorang berhadapan dengan suatu peristiwa komunikasi, maka ia cenderung menafsirkan isi komunikasi sesuai dengan prakonsepsi yang sudah dimiliki sebelumnya. Hal ini erat kaitannya dengan kecenderungan berpikir secara stereotip.
3. *Selective retention*. Meskipun seseorang memahami manfaat dari komunikasi, terkadang orang memiliki kecenderungan hanya akan mengingat apa yang mereka ingin untuk diingat. Misalnya, setelah mendapatkan informasi berimbang mengenai kinerja pemerintah di media, seorang mahasiswa yang kontra terhadap pemerintah hanya akan mengingat hal-hal jelek tentang pemerintah. Sebaliknya orang yang pro pemerintah akan cenderung untuk mengingat kelebihan-kelebihan dari pemerintah dari ulasan informasi media tersebut.

b. Hambatan Semantik

Hambatan semantik terdapat pada diri komunikator. Faktor semantis menyangkut bahasa yang digunakan oleh komunikator sebagai “alat” untuk menyalurkan pesan politik kepada komunikan. Demi tercapainya pesan politik seorang komunikator harus benar-benar memperhatikan gangguan semantis ini, karena jika salah dalam menyampaikan dapat menimbulkan salah pengertian (*misunderstanding*)

atau salah tafsir (*misinterpretation*) yang pada akhirnya bisa menimbulkan salah komunikasi (*miscommunication*).

c. Hambatan Mekanis.

Hambatan mekanis dijumpai pada media yang digunakan dalam proses komunikasi. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari hambatan mekanis terdapat pada saat suara telepon yang tidak jelas, ketika huruf buram pada surat, suara yang hilang-muncul pada siaran radio, dan sebagainya.

d. Hambatan Ekologis.

Hambatan ekologis akan terjadi disebabkan karena adanya gangguan lingkungan terhadap proses berlangsungnya komunikasi, sehingga datangnya dari lingkungan. Contoh hambatan ekologis adalah suara riuh orang-orang atau kebisingan lalu lintas, suara hujan atau petir, suara pesawat terbang lewat, dan sebagainya. Situasi komunikasi yang tidak menyenangkan seperti itu dapat diatasi komunikator dengan menghindarkannya jauh sebelum atau dengan mengatasi pada saat ia sedang berkomunikasi. Untuk menghindarkannya komunikator harus mengusahakan tempat komunikasi yang bebas dari gangguan-gangguan tersebut

B. Penelitian yang relevan

Penelitian yang relevan digunakan untuk memperkuat topik yang diangkat dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa rujukan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian yang telah dilakukan ini ditinjau dari beberapa aspek diantaranya, yaitu sebagai berikut:

1. Tesis yang berjudul “*Model Komunikasi Pembangunan dalam Penyediaan Prasarana Pedesaan di kawasan Pesisir Utara Jawa Tengah.*” Penelitian ini dilakukan pada tahun 2007 oleh Amir Mahmud mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh beberapa hal sebagai berikut:

Rendahnya penerapan prinsip-prinsip keikutsertaan, keterbukaan, rutinitas dan kohesivitas forum dalam kegiatan komunikasi penyediaan prasarana pedesaan non keagamaan memberikan bukti bahwa pola komunikasi penyediaan prasarana yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum memberi peluang akses informasi dan komunikasi yang lebih besar bagi setiap elemen masyarakat. Sedangkan untuk pengadaan sarana dan prasarana keagamaan membutuhkan forum-forum jamaah, taklim, atau forum pertemuan institusi lokal keagamaan untuk membahas berbagai persoalan yang terkait dengan sarana prasarana keagamaan.

Penerapan teknik komunikasi dua tahap, persuasif, dialogis dan *deliberative* sangat mempengaruhi intensitas kegiatan komunikasi yang dilakukan pemerintah sehingga teknik tersebut sangat sesuai dengan karakteristik masyarakat pedesaan yang menjadi target partisipasi.

2. Jurnal yang berjudul “*Kontribusi Sarekat Islam dalam membentuk masyarakat madani melalui pendidikan*”. Terbitan Vol. 7, No. 2, Des 2013: 409-430 INFERENSI. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Penelitian ini dilakukan oleh Mansur Guru Besar STAIN Salatiga pada tahun 2013. Berdasarkan penelitian tersebut di peroleh beberapa hal sebagai berikut:

Sarekat Islam (SI) sebagai kelanjutan dari Sarekat Dagang Islam (SDI) tergolong sebagai salah satu organisasi perjuangan yang memegang peranan penting dalam memberdayakan masyarakat yakni dengan meningkatkan kesadaran rakyat serta dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Pendidikan SI sejak dahulu sampai sekarang yang terdiri dari TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan Universitas yang bernama Cokroaminoto ikut serta dalam memberdayakan masyarakat, yakni menyadarkan masyarakat melalui pendidik.

Banyak output yang dihasilkan dari pendidikan SI yang berperan sebagai tokoh agama, bangsa dan Negara sehingga mampu mewujudkan masyarakat madani di Indonesia. Antara lain: Sunarto yang pernah menjadi ketua Pandu atau Pramuka Jawa Tengah, Soekarno sebagai presiden pertama RI, KH. Ahmad Dahlan sebagai tokoh Muhammadiyah dsb. SI percaya bahwa pendidikan harus diberikan mulai dasar, menengah dan tinggi.

3. Jurnal yang berjudul “*Komunikasi Politik dan Demokratisasi di Indonesia: Dari Konsolidasi menuju Pematangan*” Terbitan Jurnal Madani Edisi II/Nopember 2005. Penelitian ini dilakukan oleh Idham Holik. Berdasarkan penelitian tersebut di peroleh beberapa hal sebagai berikut:

Reformasi politik tahun 1998 telah melahirkan kebebasan komunikasi politik dan demokratisasi. Komunikasi politik dan demokrasi adalah dua sisi uang yang tak bisa dipisahkan. Media massa merupakan instrumen atau saluran utama dalam proses komunikasi politik dimana media telah menciptakan *public sphere*. Tanpa adanya kebebasan media (*media freedom*) yang dijamin oleh hukum atau konstitusi, maka sangat sulit terwujud *public sphere* bagi bangsa Indonesia.

Dalam konteks pemilu, komunikasi politik Indonesia sudah banyak perubahan. Ini terbukti dengan adanya mekanisme memilih langsung para kandidat politik, di zaman Orde Baru hal ini tidak pernah terjadi. Bahkan komunikasi politik pemilu, khususnya kampanye politik, mengalami revolusi yaitu yang dahulu memakai cara-cara konvensional dalam mempersuasi pemilih, kini menggunakan konsep amerikanisasi kampanye politik, yang pada akhirnya menciptakan politisi selibriti. Namun kemajuan tersebut ternyata tidak diiringi dengan kegiatan kampanye permanen oleh para kandidat politik terpilih atau partai politik, dimana belum terbuktinya janji-janji kampanye yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bahkan rakyat dibiarkan sendiri menghadapi kesulitan ekonomi, karena pejabat terpilih tidak berdaya terhadap mekanisme pasar (*internasional*). Inilah menjadi penyebab utama yang mengakibatkan semakin rendahnya partisipasi politik pemilih (rakyat).

4. Jurnal berjudul "*Komunikasi Politik dan Pencitraan (Analisis teoritis Pencitraan Politik di Indonesia)*". Terbitan Jurnal ISSN: 1979 – 0899X

Volume 2, No. 4, Desember tahun 2009. Penelitian ini ditulis oleh Kamaruddin Hasan. Berdasarkan penelitian tersebut di peroleh beberapa hal sebagai berikut:

Sebagain besar proses komunikasi politik merupakan *mediated politics* atau bahkan *media-driven politics*. Hal tersebut merupakan proses memproduksi dan mereproduksi berbagai sumber daya politik, seperti menggalang dan menghimpun dukungan politik dalam Pemilihan Umum, merekayasa citra dan sebagainya, dapat dijembatani atau bahkan dikemudikan oleh industri media. Maka keberhasilan politisi di era sekarang, akan banyak ditentukan oleh kemampuannya membangun jaringan atau akses terhadap media, untuk kemudian mengelola opini, persepsi, merebut simpati, dan sebagainya melalui media.

Dari sekian banyak media massa yang dapat memediasi kegiatan politik, yang dianggap paling efektif adalah televisi. Fenomena inilah yang kemudian memunculkan istilah *tele-politics* yang merupakan fenomena baru menandai bergesernya peran partai politik dan munculnya dominasi media massa terutama televisi dalam menjangkau pemilih. Di Indonesia, pengaruh televisi sangat kuat menyatu dengan keseharian masyarakat. Data Bank Dunia tahun 2004 menunjukkan, ada 65% lebih rumah tangga yang memiliki televisi di Indonesia. Bentuk media audio visual yang menarik dan lengkap menjadikan ia lebih digandrungi dibandingkan dengan produk budaya lain, seperti buku, koran dan sebagainya.

5. Jurnal berjudul “*Komunikasi Politik Kepala Desa dalam Mendorong Inovasi Pembangunan Desa: Studi Kasus Tiga Desa di Lereng Gunung Ungaran, Jawa Tengah*”. Terbitan Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 2 (1) (2017) 86-99 ISSN 2477-8060. Penelitian ini ditulis oleh Nugraheni Arumsari dkk. Pada tahun 2017. Berdasarkan penelitian tersebut di peroleh beberapa hal sebagai berikut:

Munculnya pemimpin-pemimpin lokal dengan gaya kepemimpinan dan komunikasi politiknya masing-masing membuat banyak variasi inovasi pembangunan desa yang bisa disebarluaskan. Komunikasi politik yang dilakukan kepala desa selain sebagai sarana interaksi juga sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan yang ada di desa, karena setiap interaksi yang dilakukan oleh kepala desa disitulah juga membuat masyarakat juga ikut bergerak dalam proses pembanguan, dan itu terjadi sebaliknya apabila kepala desa tidak memiliki komunikasi politik yang tidak baik bisa saja terjadi penelolakan dari masyarakat.

Selain daripada upaya komunikasi politik secara personal sering dilakukan kepala desa dalam komunikasi politik menggunakan pendekatan struktural kelembagaan dengan berinteraksi dengan lembaga-lembaga kemasyarakat yang ada didesa. Kepala desa dituntut untuk bisa bersikap dan bertindak sesuai dengan kultur budaya yang ada di masyarakat sehingga kepercayaan (*trust*), Norma dan Jaringan (*network*) yang sudah terbangun di masyarakat akan semakin kuat, dan imbasnya akan berimplikasi secara langsung dengan inovasi pembangunan yang ada di desa.

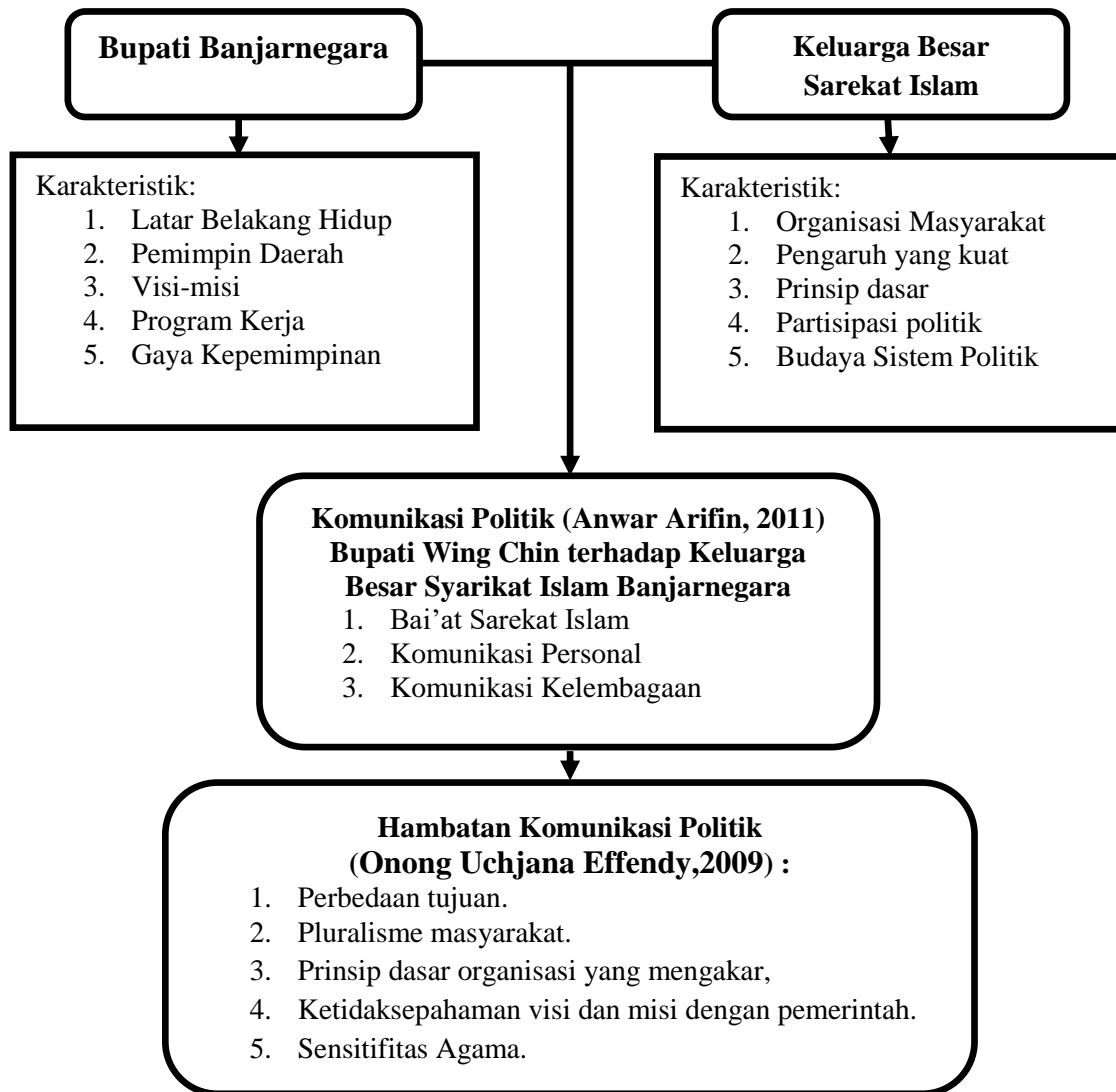
Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang komunikasi politik di tingkat lokal guna . Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu secara umum adalah komunikasi secara personal Bupati dalam penelitian ini memiliki keterikatan sosiologis sedangkan pada penelitian yang relevan komunikasi secara personal kelembagaan.

C. Kerangka Berfikir

Keterbutuhan adanya sebuah *Relationship* yang baik antara seorang pemimpin dengan masyarakat pada dasarnya berdampak pada kebaikan bersama antar aktor. Seorang pemimpin membutuhkan aspirasi dan partisipasi dari masyarakat agar dapat melaksanakan pembangunan daerah dan pembuatan kebijakan publik sesuai dengan keterbutuhan umum berdasarkan kontrak sosial. Sebaliknya masyarakat membutuhkan seorang pemimpin untuk mengakomodir segala kebutuhan dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana di gariskan dalam demokrasi bahwa pemimpin adalah representasi dari masyarakat. Untuk itu keduanya perlu untuk saling berkolaborasi agar pelaksanaan kehidupan bersama dapat dicapai sebagaimana mestinya.

Pemimpin harus mampu memahami karakteristik dari masyarakatnya dengan analisis sosial sehingga paham apa yang menjadi urgensi keterbutuhan masyarakat. Citra yang baik akan didapatkan oleh seorang pemimpin apabila mampu berperilaku arif dan bijaksana. Disinilah kemudian muncul keterbutuhan adanya komunikasi politik dari seorang pemimpin terhadap

masyarakat atau dalam hal ini Komunikasi Politik Bupati Wing Chin terhadap Keluarga Besar Syarikat Islam di Kabupaten Banjarnegara.



Bagan 1. Kerangka Berpikir

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan yang diperoleh dari penelitian proses dan hambatan komunikasi politik yang telah dilakukan oleh Bupati Wing Chin terhadap Keluarga Besar Sarekat Islam (KBSI) Banjarnegara, adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi Bupati terhadap Keluarga Besar Sarekat Islam (KBSI) Banjarnegara memperhatikan komunikasi politik sebagai berikut: (1) Merawat Ketokohan dengan *Personal Branding* sebagai SI sejati dan menjalin silaturahmi dalam forum-forum diskusi nonformal bersama Tokoh KBSI Banjarnegara; (2) Memantapkan kelembagaan dengan memberikan ruang aspirasi KBSI Banjarnegara dan berkolaborasi dalam Program Pemerintah; (3) Menciptakan kebersamaan dengan keterlibatan aktif dilapangan dalam agenda-agenda KBSI Banjarnegara dan mengintergrasikan media dengan tindakan bagi Masyarakat KBSI Banjarnegara; (4) Membangun konsensus dengan bersahabat pada semua kalangan bersama KBSI Banjarnegara dan menyusun pesan persuasif bagi semua kalangan bersama KBSI Banjarnegara.
2. Hambatan dari proses komunikasi politik Bupati Wing Chin terhadap KBSI Banjarnegara yakni hambatan secara sosio-antro-psikologis sebagai berikut: (1) Pecahnya kepengurusan Sarekat Islam menjadi SI

dan SII; (2) Perbedaan Kultur dan Budaya pada Sarekat Islam, SI fokus pada sosial-ekonomi-budaya-politik sedangkan SII khusus pada bidang Pendidikan; (3) Hambatan Psikologis Bupati Wing Chin, yakni adanya kecenderungan Bupati yang tidak menyukai forum diskusi dan mimbar perdebatan.

B. Saran

1. Adanya perbedaan keberpihakan dalam KBSI Banjarnegara yang terbagi dalam masing-masing DPC Wilayah hendaknya tetap disikapi dengan arif oleh Bupati Wing Chin dengan tetap memberikan hak yang sama dalam setiap penyelenggaraan program pemerintah.
2. Perbedaan kultur dalam KBSI Banjarnegara yang meliputi Sarekat Islam (SI) dan (SII) yang mana SI berfokus pada kegiatan Organisasi Kemasyarakatan baik bidang sosial-budaya-ekonomi-politik sedangkan SII berfokus dalam tataran pendidikan dengan Yayasan Pendidikan Islam Cokroaminoto (YPIC) perlu dilakukan upaya komunikasi secara kelembagaan dengan menyesuaikan ranahnya masing-masing, agar KBSI Banjarnegara dapat terwadahi secara menyeluruh.
3. Komunikasi yang dilakukan Bupati harus mampu memberikan fasilitasi kepada masyarakat untuk mengkritisi isu sebagai perwujudan suasana demokratis di Banjarnegara yang lebih hidup. Hal tersebut dapat menjadi bukti tingkat kredibilitas Bupati dalam pengetahuan dan adaptasi sosial kultural di Banjarnegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Tsabit Azinar, 2018. *Sejarah Syarikat Islam Banjarnegara dan Kontribusinya di Bidang Pendidikan*. Semarang: Penerbit Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud RI.
- Arifin, Anwar 2011. *Komunikasi Politik: Filsafat, Paradigma, teori, tujuan, strategi dan komunikasi politik indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2007. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiarjo, Meriam. 2010. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta Barat: Gramedia Pustaka Utama.
- Cangara, Hafied.2008. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Effendy, Onong Uchjana. 2009. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Holik, Idham. 2005. *Komunikasi Politik dan Demokratisasi di Indonesia : Dari Konsolidasi Menuju Pematangan*. Jurnal Madani Edisi II : Jakarta
- Maarif, Ahmad Syafii. 2012. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia*. Jakarta:Democracy Project.
- Maarif, Z. 2016. *Logika Komunikasi (Ed. 1-Cet. 2 ed.)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kartodirdjo, Sartono 1993. *Sejarah Pergerakan Nasional dan Kolonialisme sampai Nasionalisme Jilid 2*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Miles, Mathew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Penerjemah: Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy.2014. *Metode Penelitian Kualitatif , Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Murtiadi, Danarjati, D. P., & Ekawati, A. R. 2015. *Psikologi Komunikasi (Cetakan Pertama ed.)*. Yogyakarta: psikosain.

- Rachman, Maman. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral dalam Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Campuran, Tindakan, dan Pengembangan*. Semarang: UNNES PRESS
- Raharjo, Budhi S. 2016. *Saya Mau Jadi Muslim: Enak Jadi Kulinya Allah Upahnya Gedhe*. Banjarnegara: PT. Bumiredjo
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suprpto, Tommy. 2009. *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*. Yogyakarta: MedPress (anggota IKAPI).
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Widia sarana Indonesia.
- Widjaja, H. 2000. *Ilmu Komunikasi - Pengantar Studi (Edisi Revisi ed.)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arumsari, Nugraheni dkk. 2017. *Komunikasi Politik Kepala Desa dalam Mendorong Inovasi Pembangunan Studi Kasus Tiga Desa di Lereng Gunung Ungaran Jawa Tengah*. Jurnal Politik Indonesia Universitas Negeri Semarang. Vol 2, No 1 ISSN 2477-8060. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpi/article/view/8488/5646>. Diakses pada 27 Januari 2020 pukul 08.08 WIB.
- Hasan, Kamaruddin. 2009. Komunikasi Politik dan Pencitraan (Analisis teoritis Pencitraan Politik di Indonesia). Jurnal ISSN: 1979 – 0899X Volume 2, No. 4
- Hidayat, Fahri. 2019. Perubahan Sosial-Keagamaan di Komunitas Ahmadiyah Dusun Krucil Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara. JPA, Vol. 20, No. 1. ISSN 1411-5875.
- Murtadi, 2013. *Kontribusi Sarekat Islam dalam membentuk Masyarakat Madani melalui Pendidikan*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga. INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Vol. 7, No. 2, Desember 2013: 409-430.
- Nugroho, Heru. 2009. *Menerobos Lingkaran Involusi Politik di Indonesia*. Dalam Jurnal Analisis CSIS Volume 38 No. 3. CSIS: Jakarta. Dinamika Hukum : Palembang

- Mahmud, Amir. 2007. “Model Komunikasi Pembangunan dalam Penyediaan Prasarana Pedesaan di kawasan Pesisir Utara Jawa Tengah”. Tesis Universitas Diponegoro Semarang.
- Sari, E. Y. 2013. “Strategi Komunikasi Politik PDI-Perjuangan Pada Pemilihan Legislatif Tanjungpinang Tahun 2009”. Skripsi. FISIP. Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Al Haji. Tanjungpinang.
- Banjarnegarakab.go.id. 2017. *Profil Kepala Daerah Bupati Banjarnegara Periode 2017-2022*. <https://banjarnegarakab.go.id/website/profil-kepala-daerah/> . Diakses pada 27 Januari 2020 pukul 22.45 WIB